

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan menambah pemikiran serta pemahaman tentang sistem REDD yang menjadi salah satu instrument penyelesaian permasalahan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini diharapkan juga untuk memberikan Asumsi dan sumbangsih dalam upaya mereduksi dan mengurangi Pemanasan Global dan Emisi gas dibumi.

A. Alasan Pemilihan Judul:

Lingkungan hidup akhir akhir ini memang sering menjadi pokok pembicaraan yang hangat dikalangan masyarakat ataupun diberbagai media, terutama sekali bagi pelaku perorangan maupun negara yang memang mengalami dampak perubahan iklim dunia itu sendiri. Fenomena pemanasan global (*global warming*) salah satunya disebabkan karena laju perusakan hutan (deforestasi) yang sangat cepat. Gejala tersebut menimbulkan efek rumah kaca yang menjadi penyebab utama *global warming*. Negara-negara yang memiliki hutan tropis yang besar di dunia, termasuk Indonesia, mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu dengan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) REDD. Skema ini mulai digulirkan pada *Conference of the Parties* (COP) Perubahan Iklim di Montreal, Kanada, tahun 2005 lalu. Pengusulnya

adalah negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis di dunia. Antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, Columbia, Republic Congo, Brazil, Cameroon, Republic Demokratio Congo, Costa Rica, Mexico, dan Peru. Kesebelas negara ini memiliki 50 persen hutan tropis dunia.

Melihat kenyataan kenyataan ini, negara negara berkembang seperti halnya Indonesia, terus memperjuangkan program (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) REDD agar dapat disetujui dan di lakukan negara maju seperti Norwegia. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi global warming dan menjaga iklim bumi antara lain dengan melakukan penanaman kembali, baik di dalam kawasan hutan (reforestasi) maupun di luar kawasan hutan (afforestasi). Selain itu juga memperluas kawasan konservasi dan hutan lindung serta menghindari aktivitas pemanfaatan hutan yang menyebabkan terjadinya deforestasi. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan berupaya memperjuangkan REDD sehingga bisa diterima negara-negara maju. Indonesia memang sangat berkepentingan terhadap skema REDD. Sebab Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 120,35 juta hektar atau 60 persen dari luas daratan negara. Indonesia bersama negara-negara lain memang sudah bersama-sama menyusun gagasan baru untuk mengatasi global warming yaitu dengan menyusun skema REDD. Negara-negara yang menggagas konsep ini berharap gagasan tersebut bisa diterima negara-negara maju.

Lingkungan hidup juga disadari sebagai salah satu instrument politik suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, karena secara tidak langsung, perubahan iklim dunia dirasakan oleh semua masyarakat dunia tanpa

terkecuali. Namun demikian, negara maju terlihat sangat sulit untuk mengikuti skema REDD yang telah ada, dan dirasakan cenderung mengalami penurunan, hal ini dikarenakan Negara maju memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap energi dan industri nya. ini terlihat sebagai masalah masalah klasik yang ada di negara maju, ini menjadi masalah masalah baru yang muncul dan mengakibatkan usaha untuk menumbuhkan harapan perbaikan iklim dunia menjadi lambat. Besarnya jumlah modal yang harus diberikan Negara maju pun menjadi permasalahan yang tak kunjung henti. permasalahan yang sekarang ini terjadi seolah olah menjadi momok mengerikan bagi penyelamatan iklim dunia. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, memiliki peran yang besar dalam mendorong Negara maju dalam memperbaiki alam serta skema REDD.

Dalam aspek pemahamannya, secara khusus REDD dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk memperkecil kesenjangan saling pengertian diantara negara negara yang sudah berkembang dengan negara maju, alih teknologi dan pendanaan adalah yang terpenting. Selanjutnya jika kita berpikir mengenai hubungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi diantara bangsa bangsa, maka REDD yang sudah direncanakan secara jitu dan berfungsi secari tepat, dapat membantu meningkatkan dan memupuk hubungan tersebut sehingga dengan demikian akan memperluas wawasan saling pengertian diantara bangsa bangsa.¹

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara di dunia yang memiliki potensi alam dan hutan yang sedemikian cerah apabila dikembangkan dengan tepat. Sebagai negara yang mempunyai kekayaan

¹ *ibid*, halaman 3.

potensi wisata alam dan budaya yang kaya dan beragam, maka sepatutnyalah pemerintah Indonesia untuk semaksimal mungkin mengupayakan agar negara maju seperti Norwegia dapat membantu ekonomi dan alam di Indonesia kembali bergeliat dan kuat. Hal ini tentunya harus dibuktikan dengan pemberdayaan obyek obyek hutan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk kemudian dikembangkan sebagai tujuan proposal pendanaan dengan skema REDD, terutama sekali untuk menarik wisatawan mancanegara.

B. Latar Belakang Masalah

Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya merupakan perpaduan dan refleksi dari perkembangan dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian juga politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain, misalnya, letak geografis, faktor sumber daya alam yang dimiliki dan nilai-nilai startegis yang dimiliki oleh negara tropis tersebut. Kesemua nilai strategis tersebut tentu mempengaruhi sikap, cara pandang, serta cara bangsa ini dalam memposisikan diri di dalam pergaulan antar-bangsa. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait dengan isu lingkungan adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, seperti dalam kawasan ASEAN, EROPA, tidak luput juga negara-negara seperti Norwegia untuk menangani permasalahan lingkungan dan bahkan membuat suatu perjanjian, yang merupakan perjanjian internasional lingkungan, di mana perjanjian ini mengikat secara hukum dan ditandatangani antara semua negara sebagai suatu perjanjian yang

menanggapi adanya salah satu permasalahan lingkungan.

Hubungan bilateral Indonesia dengan Norwegia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan. Selain itu, Kedua negara juga mengembangkan kemitraan dalam isu-isu internasional penting, antara lain dalam Seven Nations Initiative (7NI) di bidang *nuclear non-proliferation*, upaya pencapaian Millenium Development Goals 4 dan 5 (mencegah kematian anak dan ibu melahirkan) yang dikemas dalam keanggotaan ”*Sherpa Group*”, menjadi *co-host* dalam *inter-media dialogue*, serta kemitraan dalam *inisiatif health and foreign policy*.²

Hubungan baik kedua negara juga tercermin dari bantuan Norwegia untuk bidang kehutanan dengan menyampaikan *pledge* dana sebesar Nok 3 miliar (USD 500 juta) setahun bagi upaya untuk mengurangi emisi gas dan penggundulan hutan-hutan di negara berkembang dalam pertemuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali bulan Desember 2007. Sebagai tindak lanjut dari *pledge* tersebut, *Special Envoy for the Norwegian Climate and Forest Initiative*, Ambassador Hans Brattskar berkunjung ke Indonesia pada tanggal 16-23 Oktober 2008 untuk mendiskusikan kemungkinan kerjasama Indonesia-Norwegia di bidang *deforestasi*.³

Ekonomi dan lingkungan telah menjadi *hard fact* bagi semua negara termasuk juga di negara-negara sedang berkembang. Bagi sebagian negara, terutama bagi Amerika serikat yang merupakan negara industri maju, hal tersebut

²Diambil dari
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=8534&Itemid=683.
Tanggal akses 8/8/210

³ *ibid*

telah mendatangkan berkah. Namun bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar negara berkembang seperti Indonesia, belum banyak membawa manfaat. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang dan memiliki luasan hutan yang terbesar di dunia, memanfaatkan globalisasi perekonomian tersebut sebagai suatu cara untuk menjalin kerja sama ekonomi bilateral maupun multilateral, baik kerja sama kemitraan ekonomi, kerja sama keuangan, investasi, teknologi, maupun kerja sama secara umum yang menangani isu lingkungan atau perubahan iklim.

Seperti pada kenyataannya sekarang ini, bahwa perekonomian Norwegia merupakan negara industri yang banyak mengalami perkembangan dengan model ekonomi terbuka dan berorientasi pada kegiatan ekspor. Terdaftar sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Norwegia juga menduduki peringkat tinggi dalam hal standar hidup, usia rata-rata, standar kesehatan secara umum dan standar perumahan. Kekayaan materi sebagian disebabkan karena kekayaan sumber daya alam, dan sebagian lagi dikarenakan keikutsertaan Norwegia dalam industri Eropa Barat, serta kedekatan dengan pasar utama. Norwegia telah menerapkan ukuran restrukturisasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.⁴

Hubungan perdagangan yang luas dengan negara lain telah memberikan industri Norwegia landasan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih maju. Jumlah investasi yang besar untuk produksi peralatan, memperbaiki standar pendidikan serta keahlian teknis dan organisasional di industri serta administrasi publik turut serta membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dan Norwegia telah

⁴Diambil dari http://www.norwegia.or.id/About_Norway/business/economy/growth/ Tanggal akses 02/05/2010

menjadi patokan bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia.

Fenomena pemanasan global (*global warming*) salah satunya disebabkan karena laju perusakan hutan (deforestasi) yang sangat cepat. Gejala tersebut menimbulkan efek rumah kaca yang menjadi penyebab utama *global warming*. Negara-negara yang memiliki hutan tropis yang besar di dunia, termasuk Indonesia, mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu dengan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD*). Skema ini mulai digulirkan pada *Conference of the Parties (COP)* Perubahan Iklim di Montreal, Kanada, tahun 2005 lalu. Pengusulnya adalah negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis di dunia. Antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, Columbia, Republic Congo, Brazil, Cameroon, Republic Democratic Congo, Costa Rica, Mexico, dan Peru. Kesebelas negara ini memiliki 50 persen hutan tropis dunia.

Norwegia mendukung penuh upaya negara-negara dengan kawasan hutan hujan tropis besar, seperti Indonesia, Brasil, dan Republik Kongo, untuk menurunkan laju emisinya. Karena Norwegia berpendapat Hutan memiliki peran yang sangat signifikan mencegah laju perubahan iklim. Di antara komunitas negara maju, komitmen Norwegia paling jelas dengan rencana penurunan emisi 30 persen dari level tahun 1990 pada tahun 2020. Adapun negara maju seperti AS dan yang lainnya masih beretorika.⁵

Pada awal 2008, Norwegia menandatangani kerja sama bilateral dengan

⁵ Diambil dari <http://matoa.org/redd/>. Tanggal akses 9/7/2010

Brasil dengan memberikan hibah US\$ 1 miliar. Brasil dengan hutan Amazon memang negara dengan area hutan terluas di dunia. Norwegia juga membentuk pendanaan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UN-REDD senilai US\$ 50 juta untuk sembilan negara, termasuk Indonesia. Tiap negara kebagian US\$ 5 juta. Sisanya, US\$ 5, juta merupakan jatah belanja PBB.⁶

Menurut *Ambassador for Climate Change, Brazil* Sergio B Serra, bantuan pendanaan yang dijanjikan oleh Norwegia sejak tahun lalu tersebut, diperkirakan masih akan lama diterima negara mereka. Pasalnya dana tersebut baru diberikan sesudah program yang disepakati menunjukkan hasil dalam penurunan emisi dan degradasi hutan di hutan Amazon. Perhitungannya ditentukan lewat satelit. Meski membutuhkan waktu untuk mendapatkan dana tersebut, namun menurut Serra, dana itu tetap dibutuhkan, Pasalnya negara-negara berkembang, seperti mereka memiliki keterbatasan pendana.⁷

Norwegia membantu upaya konservasi hutan hujan Amazon, yang 60 persen dari 550 juta hektare areanya berada di Brasil. Negara ini kemudian membentuk *Amazon Fund*, Agustus 2008, untuk menyediakan insentif bagi upaya pelestarian hutan. *Amazon Fund* bekerja sama dengan Bank Pembangunan Brasil (BNDES) mengelola bantuan dari Norwegia itu, yang rencananya akan digunakan selama 8 tahun. Jadi *Amazon Fund* sekarang menerima ide-ide dan rencana dari masyarakat yang ingin terlibat dalam pelestarian hutan Amazon. Selain itu, *Amazon Fund* menerima donasi dari masyarakat Brazil untuk pelestarian hutan.

⁶ Diambil dari
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/06/14/EB/mbm.20100614.EB133812.id.html>. tanggal akses 9/7/2010

⁷ *ibid*

Menariknya, Brasil sama sekali tidak memasukkan unsur perdagangan karbon dalam perjanjian itu. Mereka hanya berjanji mengurangi emisi dari hutan Amazon. Program itu umum dikenal sebagai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Dana dari Norwegia bukan untuk membeli kemampuan serap karbon hutan Amazon. Indonesia tentunya boleh menengok pengalaman Brasil mengelola dana bantuan itu. Misalnya dengan mulai membentuk Dana untuk Hutan Hujan Indonesia (*Indonesia Rain Forest Fund*). Dan merumuskan cara penyaluran dana itu agar lebih partisipatif menampung ide-ide dari masyarakat luas. Pembicaraan mengenai kesepakatan pasca 2012 (*post Kyoto Protocol*) atau periode kedua target penurunan emisi gas rumah kaca sudah harus diarahkan pada adanya kewajiban baru negara kelompok Annex 1 dan menutup peluang “dimainkannya” kewajiban kelompok negara Annex 1 oleh mereka sendiri. Namun disisi lain, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak bisa bebas dari komitmen untuk juga berperan dalam mengurangi kegiatan yang menyebabkan pemanasan global.⁸

Indonesia meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC*) melalui UU No. 6 tahun 1994. Tujuan konvensi ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi iklim di dunia. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara.⁹

⁸ Ari Muhammad Laporan Kelompok Kerja II IPCC dan Dampak pemanasan global pada Indonesia. 11 Mei 2007

⁹ Diambil dari <http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahogroups.com/msg26744.html> tanggal akses 23/8/2010

Untuk melaksanakan diplomasi berkaitan dengan perubahan iklim dan kehutanan, Indonesia mendapat kehormatan sebagai model kerja sama antara negara maju dan negara berkembang, menurut presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh delegasi dari Indonesia di pesawat menjelang mendarat di Oslo. Indonesia berkesempatan untuk mendapat kontribusi pendanaan berupa bantuan sukarela dari Norwegia untuk menjaga hutan tropis yang ada di dalam negeri. Pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, peningkatan citra positif Indonesia, serta dukungan masyarakat internasional terhadap integritas dan kedaulatan Indonesia menghadapi berbagai gejolak disintegrasi nasional.¹⁰

Indonesia secara internal memiliki peran yang signifikan. Negara-negara lain melihat Indonesia memiliki pola kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama negara-negara berkembang yang tergabung dalam G-77. Pasca UNFCCC Bali 2007, peta hubungan internasional sedikit banyak mulai berubah. Negara-negara berkembang kini semakin memiliki nilai tawar politik-ekonomi yang lebih kuat, dengan Indonesia sebagai pemimpinnya. Jika sebelumnya negara berkembang tidak memiliki senjata ampuh untuk balik menekan negara maju, kini sebaliknya. Negara berkembang dapat membalikkan prioritas perhatian dalam isu pemanasan global, dari *deforestasi* yang terjadi di sejumlah negara berkembang, berbalik pada industrialisasi di negara maju yang harus melakukan kompensasi (utang karbon) atas emisi yang mereka hasilkan

¹⁰ Diambil dari file:///E:/ri-norwegia-sepakati-redd+-1-miliar-dolar-as.htm tanggal akses 17/9/2010

sejak berpuluh tahun lalu.¹¹

Setelah UNFCCC Bali berakhir, isu lingkungan selanjutnya menjadi isu penting dan utama dalam percaturan internasional. Indonesia berhasil menjadi penentu dalam UNFCCC Bali berkat penerapan strategi diplomatik yang moderat dan persuasif (*soft strategy*) serta mempertemukan berbagai kepentingan dalam skema simbiosis-mutualis dan filantropi. Sebelumnya, setiap pembicaraan mengenai iklim global selalu diwarnai oleh klaim sepihak dan kental bernuansa sebagai ajang perebutan kepentingan (*hard strategy*).¹²

Norwegia dan Indonesia menyadari bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Pada bulan Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi CO₂ Indonesia hingga 26% di tahun 2020.¹³ Komitmen ini merupakan komitmen terbesar yang pernah diutarakan oleh negara berkembang. Indonesia telah menetapkan target absolut dan Norwegia ingin membantu upaya pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut. Norwegia telah sepakat bekerja sama untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dari penebangan dan degradasi hutan serta tanah gambut.

Sementara itu sebagai negara industri yang termasuk dalam Annex 1 pada Protokol Kyoto, Norwegia memiliki kewajiban mengikat untuk menurunkan emisi

¹¹ Diambil dari http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=b34fe940-5005-4995-a37a-b17700746283 tanggal akses 13/8/2010

¹²<http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Halaman%20Muka&berita=132427&pagecomment=1> 12agustus 2010

¹³ Diambil dari <file:///E:/ri-norwegia-sepakati-redd+-1-miliar-dolar-as.htm> tanggal akses 12/7/2010

karbon di dalam negerinya, terutama karena tingkat penggunaan energi fosil, industrialisasi, dan transportasi yang sangat tinggi. Terkait dengan ketidakmampuan Norwegia untuk menurunkan emisi karbon, maka negara ini bersedia memberikan hibah kepada negara berkembang, dimana salah satunya adalah Indonesia. Pemberian hibah di atas sejalan dengan kesepakatan *Conference of Parties* yang diadakan setiap tahun, yakni gagasan bagi negara-negara industri untuk mengganti kewajiban penurunan karbon di dalam negerinya sendiri dengan memberikan hibah kepada negara-negara berkembang yang memiliki sumberdaya hutan untuk mengurangi laju deforestasi dan kerusakan hutan.¹⁴ Norwegia akan mendukung upaya ini melalui bantuan dana sampai dengan 1 milyar Dolar Amerika berdasarkan kinerja Indonesia, dalam waktu 7-8 tahun kedepan.¹⁵

Pada tahun 2010, dana akan digunakan untuk menyelesaikan strategi nasional REDD untuk Indonesia. Namun, dana ini akan dikucurkan dalam periode 7-8 tahun mendatang dan sebagian besar dana berhubunga dengan pengurangan emisi oleh Indonesia yang telah diverifikasi. Dana akan diberikan berdasarkan pada hasil, dan akan dikucurkan melalui mekanisme keuangan yang telah disetujui.¹⁶

Upaya-upaya tersebut ditempuh melalui pelaksanaan program penguatan politik luar negeri dan diplomasi, program peningkatan kerja sama ekonomi luar negeri, program perluasan perjanjian lingkungan/perubahan iklim, program peningkatan kerja sama bilateral, regional, dan global/multilateral. Selain dengan

¹⁴ Diambil dari <http://www.iesr-indonesia.org/2010/11/1636/>. Tanggal akses 12/10/2010

¹⁵ Diambil dari http://www.norwegia.or.id/News_and_events/Lingkungan/-FAQ-Norway-Indonesia-REDD-Partnership-/. Tanggal akses 24/8/2010

¹⁶ Diambil dari <http://www.reuters.com/article/idUSTRE6471A920100508> tanggal akses 23/9/2010

Norwegia, Indonesia akan menggandeng negara-negara maju untuk berkontribusi dalam pendanaan program pelestarian hutan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Negara-negara itu adalah Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman.¹⁷ Di luar komitmen bilateral Indonesia dan Norwegia, dalam konferensi perubahan iklim dan pelestarian hutan di Oslo ini akan ada komitmen kerja sama pendanaan global yang nilainya mencapai antara US\$4 miliar sampai US\$5 miliar. Doktrin politik luar negeri menyatakan, tujuan politik luar negeri akan tercapai jika bersinergi dengan kebijakan di dalam negeri. Begitu pula upaya perjuangan Indonesia memburu janji negara maju pada Konferensi Oslo yang seharusnya didukung kepastian kebijakan lingkungan hidup di tingkat nasional.¹⁸ Jangan sampai jerih payah perburuan itu berakhir sia-sia karena ketiadaan komitmen di dalam negeri. Pemerintah harus membuktikan keseriusannya dalam upaya penegakan hukum lingkungan, termasuk memburu para perusak hutan kelas kakap di Indonesia. Jika tidak, sangat mungkin negara donor mendadak menghentikan bantuan dan mengalihkannya ke negara lain yang lebih potensial, seperti Brazil, Tiongkok, atau India sehingga meninggalkan Indonesia yang berburu tanpa hasil.

Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian kerja sama untuk REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) yang dilakukan menteri luar negeri kedua negara untuk mengatasi emisi gas rumah kaca

¹⁷Diambil dari <http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Halaman%20Muka&berita=132427&pagecomment=1>. Tanggal akses 02/05/2010

¹⁸Diambil dari http://es-la.facebook.com/note.php?note_id=121157881257698. Tanggal akses 02/06/2010

dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut. Penandatanganan itu disaksikan Presiden SBY dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg. Dalam kerja sama itu, Norwegia berjanji menyumbang US\$1 miliar (Rp9 triliun) untuk penurunan karbon, peningkatan kapasitas pelaku dalam negeri, dan langkah-langkah persiapan REDD di Indonesia.¹⁹

Sebagian besar bantuan Norwegia akan terkait dengan pengurangan emisi yang akan diverifikasi sejalan dengan rencana Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Target penurunan emisi secara sukarela seperti yang diumumkan oleh Presiden Yudhoyono pada akhir tahun lalu, merupakan bukti kepemimpinan Indonesia yang berperan besar dalam proses perubahan iklim global,” menurut Perdana Menteri Stoltenberg di gedung *Government Guest House*, Oslo”.²⁰

Komunikasi intensif terus dilakukan antara Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia dan Direktorat Perubahan Iklim Norwegia. Konferensi jarak jauh digelar dua pekan sekali, lantas meningkat menjadi sepekan sekali. Rapat membahas draf perjanjian kerja sama. Indonesia meminta nilai uang disebutkan. Sebaliknya, Norwegia menolak. Sebab, anggaran pada tahun tersebut sedang berjalan. Padahal, seperti umumnya, setiap penggunaan *budget* mesti mendapat persetujuan parlemen. Akhirnya, mereka menyampaikan komitmen US\$ 1 miliar, bagian dari "belanja karbon" Norwegia selama 6-8 tahun.

Kerja sama Indonesia-Norwegia disepakati dibagi dalam tiga fase.

¹⁹ Diambil dari <http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Halaman%20Muka&berita=132427&pagecomment=1> Tanggal akses 12/6/ 2010

²⁰ Ibid

Pertama, persiapan, Juli-Desember 2010, yakni membuat rencana aksi nasional, membentuk lembaga pengelola dana hibah (*trust fund*) dan lembaga pengukur, pelaporan, dan verifikasi (*measurement, reporting, and verification/MRV*) untuk memantau keberhasilan, serta menentukan provinsi sebagai proyek percontohan. "Pada tahap ini, sampai tahun ini, diharapkan dana awal cair US\$ 100-200 juta," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan.²¹ Pada fase kedua, kata Zulkifli, Januari 2011 Desember 2013, yang dilakukan adalah mengoperasikan lembaga pembiayaan, moratorium izin baru konversi hutan alam primer dan gambut, menyusun database hutan rusak untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi, penegakan hukum penebangan kayu ilegal dan perdagangan kayu gelondongan. Selanjutnya fase ketiga, Januari 2014, adalah pelaksanaan moratorium secara nasional. Pada tahun itu juga dilakukan penghitungan REDD untuk mencairkan dana hibah kepada Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun bergegas menyiapkan infrastruktur untuk memenuhi butir-butir perjanjian. Salah satunya merancang pembentukan lembaga penampung dan pengelola dana bantuan perubahan iklim. Namanya Indonesia Climate Change Trust Fund. Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahril Loetan ditunjuk sebagai ketua steering committee pembentukan lembaga tersebut. Menurut Syahril, *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) telah dibikin pertengahan tahun lalu. Namun bentuknya baru sebatas fasilitas rekening penampung dana hibah perubahan iklim. Lembaga

²¹ Diambil dari
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/06/14/EB/mbm.20100614.EB133812.id.html>.

Tanggal akses 9/7/2010

pengelolanya belum ada. Untuk sementara, pemerintah menunjuk United Nations Development Programme (UNDP). Sebagai lembaga internasional, UNDP dinilai berpengalaman dan kredibel.²² Saat ini akun ICCTF telah terisi dana 350 ribu pound sterling, pencairan hibah dari Inggris awal tahun ini. Negara donor lain, seperti Belanda, Prancis, dan Jepang, juga tertarik membantu. Tapi mereka ingin melihat melihat akuntabilitas pengelolaan dana terlebih dulu.

Dengan berbagai argumen yang telah penulis paparkan, Skripsi ini mencoba melihat Latar Belakang Diterimanya *Reducing Emission from Deforestation and Degradation* (REDD) Indonesia Terhadap Norwegia. Tentunya hal tersebut dapat dianalisa dari sikap pemerintah kedua negara itu dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan terhadap satu sama lainnya.

C. Rumusan masalah

Sesuai dengan ulasan yang dikemukakan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Mengapa Norwegia menerima proposal REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) dari Indonesia ?

D. Kerangka Teori

Untuk mengeksplorasi lebih jauh persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis memerlukan kerangka dasar teori yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini, di antaranya:

²² Diambil dari
<http://majalah.tempinteraktif.com/id/arsip/2010/06/14/EB/mbm.20100614.EB133812.id.html>.
Tanggal akses 9/7/2010

1. Teori Rational Choice

Didalam pembuatan kebijakan luar negeri, suatu Negara mempertimbangkan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari politik dalam negeri, dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer yang ada. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.

Seperti telah dikemukakan diatas, pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara senantiasa ditujukan untuk memenuhi *national interestnya*, kepentingan nasional ini dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual dan rencana-rencana yang dituju oleh suatu negara.

Pada aspek pengambilan keputusan terkadang suatu negara menggunakan pendekatan *Rational Choice*, Pendekatan ini memandang adanya kaitan erat antara faktor politik dan ekonomi terutama dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam *rational choice theory*, suatu negara dalam bertindak mengambil suatu keputusan selalu didasarkan pada pilihan-pilihan rasional. Dan Terdapatnya mekanisme serta pertimbangan untung rugi menjadikan *rational choice theory* dominan dalam aplikasinya dan sangat cocok untuk menjadi salah satu pilihan dalam pengambilan keputusan. Dan ini diperjelas oleh pemikiran yang disampaikan oleh James S. Coleman mengenai *rational choice theory* Menurutnya adalah:

“Inti dari politik dalam *Rasional Choice* adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk rasional ia selalu mempunyai tujuan-tujuan (*goal-seeking* atau *goal-oriented*) yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya (*resource restraint*) dan karena itu ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia harus memilih antara beberapa alternatif dan menentukan alternatif mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal baginya. Untuk itu ia menyusun suatu ranking preferensi, misalnya ia membuat ranking alternative *a, b, c, ..., n*. alternative *a* ternyata lebih baik dari alternative *b*, dan *b* merupakan alternatif lebih baik dari *c*. Dengan sendirinya alternatif *a* lebih baik dari alternatif *c*. dan ia tidak akan menerima pengaruh dari orang lain terhadap pilihan *a*, tanpa alasan rasional”.²³

Pelaku *rational action* ini, terutama politisi, birokrat, pemilih (dalam berbagai pilihan), dan aktor ekonomi, pada dasarnya egois dan segala tindakannya berdasarkan kecenderungan ini. Mereka selalu mencari cara yang efisien untuk mencapai tujuannya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori *rational choice*.

Sebagai negara industri yang termasuk dalam Annex 1 pada Protokol Kyoto, Norwegia memiliki kewajiban mengikat untuk menurunkan emisi karbon di dalam negerinya, terutama karena tingkat penggunaan energi fosil, industrialisasi, dan transportasi yang sangat tinggi.

²³ James S. Coleman, “Rational Choice Theory,” dalam Edgar F. Borgotta, ed., *Encyclopedia of Sociology*, Vol III (New York: Macmillan Publishing Company, 1992), hlm. 1621

Terkait dengan ketidakmampuan Norwegia untuk menurunkan emisi karbon, maka negara ini bersedia memberikan hibah kepada negara berkembang, dimana salah satunya adalah Indonesia. Pemberian hibah ini sejalan dengan kesepakatan *Conference of Parties* yang diadakan setiap tahun, yakni gagasan bagi negara-negara industri untuk mengganti kewajiban penurunan karbon di dalam negerinya sendiri dengan memberikan hibah kepada negara-negara berkembang yang memiliki sumberdaya hutan untuk mengurangi laju deforestasi dan kerusakan hutan.²⁴

Norwegia yang merupakan negara industri yang memiliki sumber *financial* yang terbesar di dunia saat ini memiliki prospek yang bagus untuk menjadi mitra bagi Indonesia di dalam membantu mencegah perubahan iklim terutama bidang kehutanan di Indonesia.

Berdasarkan Protokol Kyoto tahun 1997 yang ditandatangani oleh 119 negara dan mulai diberlakukan pada 2005, memerintahkan kepada 37 negara industri besar di dunia yang dikelompokkan dalam Annex I, untuk menurunkan kadar emisi karbondioksida mereka menjadi 5,2% pada 2012. Ini karena 37 negara tersebut menjadi “pemain utama” penyumbang polusi di dunia. Norwegia adalah salah satu dari negara Annex I.²⁵

Sebagai negara industri yang termasuk dalam Annex 1 pada Protokol Kyoto, Norwegia memiliki kewajiban mengikat untuk menurunkan emisi karbon di dalam negerinya, terutama karena tingkat penggunaan energi fosil,

²⁴ Diambil dari <http://www.theglobejournal.com/kategori/lingkungan/skema-redd-dan-masa-depan-ekonomi-hutan.php>. tanggal akses 19/10/2010

²⁵ Diambil dari <http://www.korankaltim.co.id/read/news/2011/4138/perdagangan-emisi-karbon-ancam-potensi-hutan.html>. tanggal akses 15/10/2010

industrialisasi, dan transportasi yang sangat tinggi. Norwegia memiliki pilihan yang rasional menanggapi Protokol Kyoto itu.

Pilihan A: Bila perusahaan industri besar di Norwegia yang menghasilkan polusi emisi karbondioksida 100 ribu ton per tahun. Pemerintah setempat memerintahkan perusahaan itu menurunkan emisi 5,2% berdasarkan Protokol Kyoto tersebut menjadi (anggaplah) 95 ribu ton. Menurunkan emisi bukan hal gampang dan murah. Perusahaan di Norwegia itu harus alih teknologi yang ramah lingkungan, mengganti mesin-mesin, membayar SDM baru dan bisa berakibat pada stabilitas produksi. Anggap saja biaya untuk mereduksi emisi bila perusahaan yang ada di Norwegia mengganti mesin-mesin adalah USD20 per ton. Artinya, untuk mengurangi 5 ribu ton emisi diperlukan biaya USD100 ribu. Dan model Protokol Kyoto segera akan memukul perekonomian Norwegia, sebab standarisasi mesin secara mendadak dianggap hanya akan menimbulkan goncangan yang berakibat pada naiknya harga barang-barang konsumsi dan besar kemungkinan akan memicu pengangguran.

Sedangkan pada pilihan B: Norwegia menerima dan menyetujui skema REDD yang diajukan oleh Indonesia yang merupakan pemilik hutan terbesar ketiga di dunia serta berbagai aneka kekayaan hayati lain, dan menjadi salah satu *supplier* strategis kebutuhan udara bersih dunia dengan memberikan hibah sebesar USD 1 miliar untuk membiayai upaya penanganan kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia yang dibagi tiga fase pencairan dana selama empat tahun. Dalam kasus ini, Pemerintah Norwegia (yang mewakili industrinya) dan Pemerintah Indonesia sebagai pengelola hutan. Skema REDD ini membuat

Norwegia sebagai "negara pencemar" bebas saja melanjutkan industrinya yang penuh polusi itu, sementara Indonesia tetap menjaga hutannya agar bisa menyerap polusi di atmosfer yang salah satunya dari Norwegia. Dengan tanpa mengorbankan industri besar yang ada didalam negeri Norwegia.

Dengan demikian norwegia memilih pilihan B, setelah membayar kepada negara-negara yang memiliki banyak hutan seperti Indonesia melalui skema REDD, Norwegia masih tetap bisa membuang emisi mereka tanpa batasan karena merasa sudah membayar kompensasinya. Norwegia yang menghasilkan emisi karbon melalui industri dinegaranya dianggap telah memberikan sumbangsih untuk mengatasi perubahan iklim melalui skema REDD, termasuk ikut mendukung Indonesia yang telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 % sampai dengan tahun 2020. Dan citra Norwegia yang merupakan negara maju menjadi baik dimata dunia Internasional, karena dianggap sebagai negara maju yang terdepan dalam isu perubahan iklim. Serta Norwegia memiliki tambahan waktu untuk berupaya mengurangi emisinya dengan berbagai cara yang tidak terlalu merugikan ekonomi dalam negerinya untuk menuju komitmen mengurangi 30 persen emisinya dari tingkat emisi 1990 pada tahun 2020, 10 persen di antaranya melalui skema offset dan carbon permit.

Bagi Norwegia yang merupakan negara yang memiliki industri besar yang ada didalam negerinya serta pengeksport bahan bakar fosil, implikasi pengurangan emisi berupa penurunan konsumsi energi dapat mengandung arti pengurangan pendapatan ekspor. Pertumbuhan permintaan batubara dan minyak bumi khususnya, di luar pertumbuhan sebagaimana biasanya (*business as usual*), akan

dihambat oleh target pengurangan emisi Protokol Kyoto tersebut. Disisi lain, keuntungan lain bagi Norwegia yang memilih pilihan B, Norwegia masih dapat mengekspor bahan bakar fosil tanpa merasa terhambat karena protokol kyoto.

Indonesia mengajukan mekanisme pembiayaan REDD terhadap Norwegia dalam upaya menghambat perubahan iklim, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Norwegia yang memilih pilihan B dan sudah mengkalkulasi (untung-rugi), menyepakatinya melalui pemberian bantuan pendanaan sebesar USD 1 miliar untuk membiayai upaya penanganan kerusakan hutan dan deforestasi di Indonesia, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan berbentuk *letter of Intenst (LOI) REDD* di *Government Guest House*, Oslo, Norwegia. Namun untuk tahap awal, Norwegia memberikan pendanaan sebesar USD 30 juta kepada Indonesia.

E. Hipotesa

Norwegia menerima proposal REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) dari Indonesia disebabkan karena :

Pertama, Skema dan mekanisme pembiayaan REDD yang diajukan oleh Indonesia dianggap sangat sesuai dan dapat dijalankan dan memenuhi syarat untuk didanai oleh Norwegia.

Kedua, Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga di dunia serta berbagai aneka kekayaan hayati lain, dan menjadi salah satu *supplier* strategis kebutuhan udara bersih dunia, dianggap pantas untuk didanai

dalam program REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) oleh Norwegia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan menambah pemikiran serta pemahaman tentang system REDD yang menjadi salah satu instrument penyelesaian permasalahan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
2. Penelitian ini diharapkan juga untuk memberikan Asumsi dan sumbangsih dalam upaya mereduksi dan mengurangi Pemanasan Global dan Emisi gas dibumi.

G. Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahannya tidak terjadi penyimpangan. Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan, bahwa dalam penelitian penulisan Skripsi ini penulis akan mengkaji perkembangan dan dinamika hubungan Indonesia-Norwegia Dalam Pelaksanaan Program REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) sebagai studi kasus, dimana Indonesia dan Norwegia menjalani pelaksanaan

Program REDD sebagai sistem pendanaan pemeliharaan hutan bagi pengurangan emisi gas dunia yang menjadi problem permasalahan *Climate Change*. Yang nantinya program ini di harapkan dapat menjadi sistem alternative bagi dunia untuk penyelamatan iklim dunia.

Selain itu apabila ada pembahasan masalah-masalah yang ada diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis serta untuk menjelaskan uraian yang dimaksud.

H. Methodologi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan tehnik pengumpulan data dari berbagai sumber data sekunder, seperti buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lainnya.²⁶ Tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan berbagai buku, terbitan, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lain yang berbentuk elektronik (yang biasa didapat melalui instrumen internet).

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisannya adalah

²⁶ Gorys Keraf, *Komposisi*, Ende, Nusa Indah, 1984, hal. 165.

sebagai berikut :

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, Memuat tentang Posisi Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim. Posisi Norwegia Dalam Isu Lingkungan Hidup. Dinamika Hubungan Indonesia dan Norwegia.

Bab III, Dalam BAB III penulis Akan membahas tentang proposal skema REDD oleh Indonesia terhadap Norwegia. Proses penandatanganan *LOI* Indonesia-Norwegia tentang Program REDD.

Bab IV, Dalam BAB IV ini penulis Akan membahas tentang Hutan Indonesia Bagi Penanganan Perubahan Iklim Dunia. Norwegia Membantu Hutan Indonesia Melalui Skema REDD.

Bab V, Merupakan ujung dari penulisan ini maka penulis akan menulis tentang kesimpulan, saran sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini.